PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KEUANGAN**

UNIT KERJA : **DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PUJI SUPRIYANTI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN I**
3. NHK : **197709**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.960.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/97 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
5. Tanah Seluas 645 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
6. Tanah Seluas 606.8 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.500.000
7. Tanah Seluas 641 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 351.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MNIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp. 8.500.000

4. MOBIL, HONDA BRIO BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HADIAH Rp. 16.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**153.900.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**1.224.255.510**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.689.655.510**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.689.655.510**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.